



LAPORAN KINERJA 2022

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Tahun 2022 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 16 Januari 2023

Kepala Loka



Nia Naeluk Hasanah Ridwan, S.S
NIP. 19750401 200502 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan,	3
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022	15
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	16
2.4 Pengukuran Kinerja	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	22
3.3 Akuntabilitas keuangan Tahun 2022	41
3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	43
IV. PENUTUP	47
4.1 Capaian Kinerja Utama	47
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	48
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 awal.....	15
Tabel 2.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 Revisi	16
Tabel 3.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 Revisi desember	16
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja LRSDKP Revisi Desember tahun 2022.....	17
Tabel 5.	Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2022	22
Tabel 6.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 1	24
Tabel 7.	Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 1	25
Tabel 8.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 2	26
Tabel 9.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 3	27
Tabel 10.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4	29
Tabel 11.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5	32
Tabel 12.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6	34
Tabel 13.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 7	36
Tabel 14.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 8	38
Tabel 15.	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9	40
Tabel 16.	Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2022	41
Tabel 17.	Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022.....	42
Tabel 18.	Perhitungan Efisiensi Anggaran LRSDKP Tahun 2022	44
Tabel 19.	Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Tahun 2022.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 48/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	6
Gambar 3.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2022	7
Gambar 4.	Dashboard Kinerja LRSDKP	21
Gambar 5.	Nilai Smart LRSDKP Tahun 2022	45
Gambar 6.	Dashboard Kinerja LRSDKP	47

IKHTISAR EKSEKUTIF

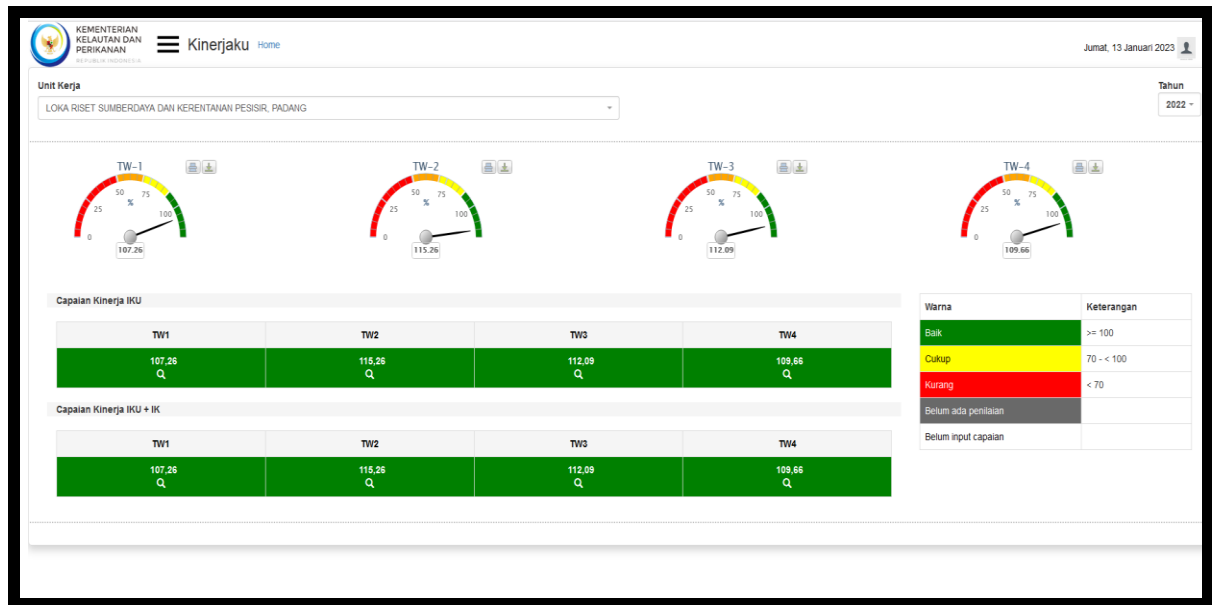
Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan tahun 2022. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2022 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2022 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 sebesar 109,66%.



Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Tahun 2022 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 109,66%.



Dashboard Kinerjaku LRSDKP 2022

Selama tahun 2022, semua IKU LRSDKP telah mencapai target bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja LRSDKP Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Capaian	%
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100	100	100
	2	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1	0,01	120
	3	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76	84.5	111,18
	4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92	97,88	106,39

	5	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86	100	116,28
	6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70	100	120
	7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89	97,71	109,79
	8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81	83,78	103,43
	9	Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1	1	100

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,18. Efisiensi Anggaran menunjukkan perlehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20, Efisiensi Anggaran 0,18 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 50,46. Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 50,46 dan capaian nilai Smart 83,78 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 99,82% dengan tingkat Capaian Realisasi output 100%.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Target untuk tahun 2023 perlu memperhatikan rencana perubahan organisasi

Pada tahun 2023, terdapat perubahan Organisasi. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap perubahan indikator kinerja utama LRSDKP dan juga atasannya sampai dengan level I bahkan KKP. Target nilai IP ASN misalnya, perlu mendapatkan perhatian karena adanya SDM yang berpindah, mengingat komposisi dan kualifikasi Pendidikan pegawai mempengaruhi terhadap pencapaian IKU IP ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dan target 2023.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP



BAB I

PENDAHULUAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Tahun 2022, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber

Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;

2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 48/PERMEN-KP/2020

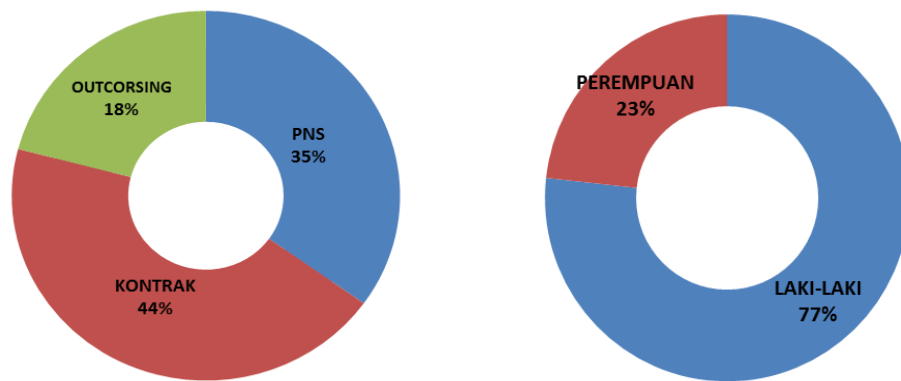
Kemudian terdapat perubahan lagi pada struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi LRSDKP sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

1.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dan memiliki pegawai yang berjumlah 42 orang, yang terdiri dari 14 PNS (34,8%) dan 19 Tenaga Kontrak (44,1%) dan 9 Tenaga Outcorcing (20%). Pegawai PNS 13 orang di kantor LRSDKP dan 1 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai kontrak 9 orang di kantor LRSDKP dan 10 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga Outcorsing 7 orang berada di kantor LRSDKP dan 2 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2022.



Gambar 3. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2022

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama tahun 2022
2. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2022 dan pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2022; dan
6. **Lampiran-lampiran :**
 - a. Perjanjian Kinerja awal tahun 2022
 - b. Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2022



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005 - 2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020 - 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020 - 2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BRSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020 - 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020- 2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

I. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

3. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

4. Sasaran Program

Renstra LRSDKP Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir merupakan kondisi yang akan dicapai sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC).

LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel, Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 3 (Tiga) sasaran Kegiatan (SK) yang harus dicapai, kemudian terjadi perubahan peta strategis pada triwulan II, dari 3 Sasaran Kegiatan pada Triwulan I berubah menjadi 2 Sasaran Kegiatan pada Triwulan II dan III, kemudian terjadi perubahan lagi pada triwulan IV menjadi 1 sasaran kinerja. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK).

Sasaran Kegiatan Kesatu (SK-1) yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir, dengan indikator kinerja:

- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) dari 100% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2024
- Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen) adalah ≤ 1 setiap tahunnya dari 2022 sampai 2024
- Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks) dari 76 tahun 2022 menjadi 76 tahun 2024
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP dari 92% pada tahun 2022 menjadi 92% pada tahun 2024
- Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen) pada tahun 2022 sebesar 86%
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) sebesar 70% tahun 2022.
- Nilai IKPA Satker LRSDKP dari 89 tahun 2022 menjadi 89 tahun 2024
- Nilai kinerja anggaran (NKA) Satker LRSDKP dari nilai 81 tahun 2022 menjadi sangat baik tahun 2024
- Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja), dari 1 unit kerja pada tahun 2022 menjadi 1 pada tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti oceanografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;

- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

2.2 RENCANA KERJA TAHUN (RKT) 2022

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.412.147.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 5 output yakni:

- Output Cadangan/pengadaan Barang Jasa Rp1.500.000.000,-
- Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Rp1.500.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp5,412,147,000,-

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 awal

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
IKSK.1.1	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit)	Rp1.500.000.000,-
IKSK.1.2	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	Rp1.500.000.000,-
IKSK.1.3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	Rp5,412,147,000,-

Kemudian mengalami pemotongan sehingga pagu anggaran menjadi Rp6.912.647.000 yang terbagi dalam 2 output antara lain :

- Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Rp1.500.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp5,412,147,000,-



Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 Revisi

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
IKSK.1.1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	Rp1.500.000.000,-
IKSK.1.2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	Rp5,412,147,000,-

Kemudian mengalami pemotongan lagi sehingga pagu anggaran menjadi Rp4.808.489.000 yang terbagi dalam 1 output:

- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp4.808.489.000,-

Tabel 3. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 Revisi Desember

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
IKSK.1.2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	Rp4.808.489.000,-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Level 3 LRSDKP Tahun 2022, telah mengalami revisi sebanyak 3 (Tiga) kali perubahan, sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2022, dilakukan Revisi 1 tentang penambahan IKU “Unit Kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja),

hal ini sesuai dengan perubahan tapja yang ada di pusat Riset Kelautan. IKU ini merupakan IKU atasan (Pusriskel) yang langsung diturunkan ke UPT.

2. Pada bulan Mei 2022, dilakukan Revisi 2 tentang Penghapusan Sasaran Kegiatan “Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan” dan IKU yang menyertainya yakni “Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit). Perubahan ini berdasarkan kebijakan tentang perubahan kelembagaan bidang Riset beralih ke BRIN sehingga sarana dan prasarana pendukung lembaga Riset yang ada di KKP tidak perlu diadakan atau ditambah.
3. Pada bulan Desember 2022, dilakukan Revisi 3 tentang Penghapusan Sasaran Kegiatan “Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan” dan IKU yang menyertainya yakni “Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis)” Perubahan ini berdasarkan kebijakan tentang perubahan kelembagaan bidang Riset beralih ke BRIN sehingga Anggaran Riset tentunya tidak bisa digunakan lagi di KKP mengingat tusunya sudah berubah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dengan rincian dan target pada tahun 2022 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja LRSDKP Revisi Desember tahun 2022 berdasarkan *Balanced ScoreCard* (BSC)

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
1	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100
		2	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1
		3	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks	76
		4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		5	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86

		6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70
		7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81
		9	Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

	Baik	Skor ≥ 100
	Cukup	Skor $70 \leq \text{Skor} < 100$
	Kurang	Skor < 70
	Belum ada pencapaian	Skor 0
	Belum input capaian	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja LRSDKP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Keputusan Kepala Loka Riset tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LRSDKP.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua Bidang yang ada di LRSDKP. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Koordinator Tata Operasional. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Bagian Program merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

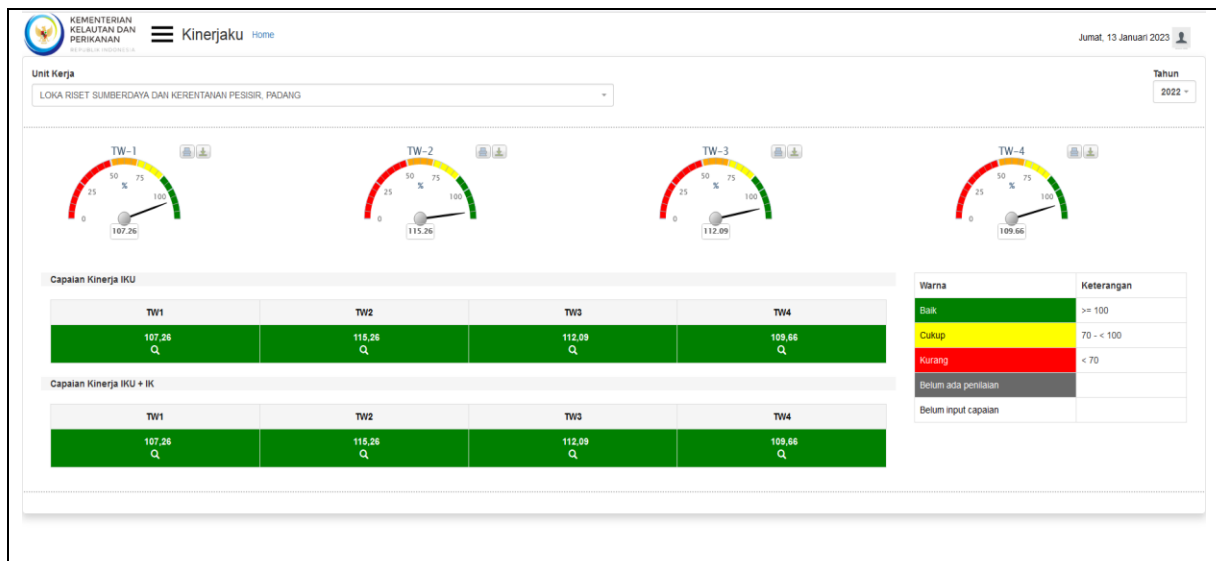
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 sebesar 109,66, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Selama tahun 2022, dari 9 IKU yang menjadi target LRSDKP, kesemuanya menunjukkan status capaian hijau atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2022 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2022 menjalankan 1 (Satu) Sasaran Kegiatan dengan 9 IKU, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 5. Capaian kinerja LRSDKP tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Capaian	%
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100	100	100
	2	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1	0,01	120
	3	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76	84.5	111,18
	4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92	97,88	106,39
	5	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86	100	116,28

	6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70	100	120
	7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89	97,71	109,79
	8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81	83,78	103,43
	9	Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1	1	100

Sasaran Kegiatan 1

Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir

Indikator Sasaran Kegiatan 1

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal satker LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dalam hal Layanan Perkantoran dan layanan umum Riset Kelautan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dan Monitoring dan Evaluasi Riset Kelautan, Layanan Kerjasama Riset Kelautan.

FORMULASI

- Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.



D. Formula : *Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal* =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Terdapat 3 buah layanan yang menjadi target tahun 2022 ini yakni: Layanan dibawah tanggung jawab Tata Usaha, Layanan dibawah tanggungjawab Tata Operasional, Layanan dibawah tanggungjawab Pelayanan Teknis. Sampai dengan akhir akhir tahun anggaran 2022 dari ketiga layanan tersebut telah terealisasi sehingga capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal satker bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 1

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	100	100	100	100	-	100	100

Indikator Sasaran Kegiatan Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100 persen, IKU ini telah terealisasi sampai dengan akhir tahun 2022 sebanyak 13 dokumen layanan dukungan manajemen internal satker LRSDKP, yang terdiri dari 12 laporan Ringkas Layanan Dukungan Manajemen internal Satker LRSDKP yakni TO, TU dan PT masing-masing 4 dokumen laporan ringkas Layanan Dukungan Manajemen internal satker dan 1 dokumen laporan akhir layanan dukungan manajemen internal satker LRSDKP.

Tabel 7. Rincian Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 1

Layanan Dukungan	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian
Tata Operasional	4	4	100%
Tata Usaha	4	4	100%
Pelayanan Teknis	4	4	100%
Laporan Akhir	1	1	100%
Total	13	13	100%

Secara umum, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP, diantaranya:

1. Adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.
2. Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing layanan ini.

Indikator Sasaran Kegiatan 2

Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian atas indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK UPT LRSDKP (%) adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 2

Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian Terhadap Renstra
0.01	0.01	≤ 1	0.01	120	-	≤ 1	120

Indikator Sasaran Kegiatan Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan satker LRSDKP (persen), tercapai 0,01 atau 120% dari target ≤1% karena LRSDKP pada tahun 2022 tidak ada temuan BPK. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaiannya sama yakni 0,01 atau 120% karena memang pada tahun 2021 juga tidak ada temuan dari BPK.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BRSDM, antara lain:

1. komitmen pimpinan untuk senantiasa mengawal perjalanan organisasi serta realisasi keuangan;
2. Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah;
3. Inventarisasi asset;
4. Reviu laporan keuangan;
5. Penyelesaian catatan reviu laporan keuangan dan rekonsiliasi data BMN dan keuangan serta pengawasan melalui audit dan evaluasi;
6. Perbaikan pengelolaan keuangan;
7. Perbaikan pengelolaan barang milik negara (BMN);
8. Perbaikan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
9. Penguatan system pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan melalui penilaian resiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya resiko pada kegiatan strategis dan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis;

Indikator Sasaran Kegiatan 3

Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Terdapat empat dimensi indeks profesionalitas yang terdiri dari kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja dengan bobot penilaian secara berurutan: kompetensi (40), kinerja (30), kualifikasi pendidikan (25) dan disiplin (5). Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 3

Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
82,69	85,47	76	84,50	111,18	-1,14	76	111,1

Indeks Profesional ASN tahun ini telah mencapai target yakni 84,50 (111,18%) dari target 76. Capaian ini diperoleh dengan dukungan masing-masing komponen sebagai berikut: Kualifikasi pendidikan 14,64, Kompetensi 40, Kinerja 25 dan Disiplin Pegawai 4.86. Indikator Kinerja ini mengalami penurunan sebesar 0,97 poin atau 1,14% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2021) hal ini disebabkan adanya 3 orang pegawai yang pindah ke BRIN yang rata-rata berpendidikan S2 sehingga mengurangi poin pada komponen penilaian kualifikasi pendidikan.

Keberhasilan dari pencapaian IKU ini ditopang oleh peningkatan profesionalisme ASN melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara daring; komitmen pimpinan dan inisiasi E-milea sebagai saluran pelaksanaan pelatihan

kompetensi aparatur secara daring; keaktifan pegawai dan operator dalam pemutakhiran data.

Tercapainya target Nilai IP ASN LRSDKP ini mencerminkan adanya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Sejak adanya pandemi pada 2 tahun kemarin memaksa unit organisasi dan seluruh pegawai untuk bertransformasi ke era digital. Pelaksanaan rapat, pelatihan, seminar secara daring sangat efektif untuk penggunaan waktu kerja yang banyak dilakukan di rumah (work from home) sehingga pemanfaatan sumber daya berbasis digital seperti laptop, PC, ponsel dan jaringan internet menjadi lebih efisien.

Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN LRSDKP ini antara lain disebabkan oleh:

- a. Terdapat pegawai LRSDKP yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
- b. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
- c. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
- d. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
- e. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan

Indikator Sasaran Kegiatan 4

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Adapun capaian atas indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 4

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	98,15	92	97,88	106,39	100	92	106,39

Indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP telah mencapai target yaitu 97,88 (106,39%) dari target 92, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 0,27 atau -0,27, hal ini dikarenakan adanya kesalahan input pada kolom validasi pada aplikasi kinerja (indikator Kinerja) sehingga nilai NPPS turun dari 113,5 menjadi 107.26 dan berpengaruh pada nilai rekon kinerja pada triwulan 3.

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja LRSDKP tahun 2022 ini secara umum disebabkan oleh:

- 1) Adanya kecermatan dan keakuratan operator dalam melakukan penginputan baik itu di aplikasi kinerja, laporan kinerja, dokumen manual IKU, dokumen Rencana aksi baik target maupun capaian.
- 2) Adanya pemantauan yang sering dilakukan terhadap beberapa dokumen tersebut sehingga bisa dilakukan penyesuaian jika terdapat data yang belum sesuai.
- 3) Berhati-hati dalam menentukan target dari masing-masing IKU supaya capaian sesuai dengan target tiap triwulannya.

FORMULASI

A. Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 aspek yaitu :

Aspek Kepatuhan (A-I)

Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III

Jenis Dokumen yang dibutuhkan	Keterangan
1 Perjanjian Kinerja*	Revisi terakhir jika ada
2 Manual IKU	Revisi terakhir jika ada
3 Rincian Target IKU*	Revisi terakhir jika ada
4 Rencana Aksi*	Khusus level 2
5 LKJ/LCK Triwulan I*	LCK bisa diambil pada aplikasi kinerjaku
6 LKJ/LCK Triwulan II*	
7 LKJ/LCK Triwulan III*	
8 Data dukung LKJ/LCK Tw III	Cek per IKU

Keterangan:
* Dokumen ditandatangani

Nilai Aspek Kepatuhan = Bobot 30% X Nilai total dokumen

$$\text{Nilai Total Dokumen} = \frac{\text{dokumen yang ada}}{\text{total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$$

Contoh perhitungan:

Dokumen yang ada hanya bisa dilengkapi 7 dokumen

$$\text{Nilai total dokumen} = (7 / 8) \times 100 = 87,5$$

$$\text{Nilai aspek kepatuhan} = 30\% \times 87,5 = 26,25$$

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kepatuhan sebesar 26,25

Aspek Kesesuaian (A-II)

Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.

Kesesuaian Data dan Informasi		Kesesuaian Target		Kesesuaian Realisasi	
Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max
PK ↓ Manual IKU	1 (A)	PK ↓ LKJ/LCK TW III	1 (E)	LKJ/LCK TW III ↓ Kinerjaku	1 (H)
PK ↓ Rincian Target IKU	1 (B)	PK ↓ Kinerjaku	1 (F)		
PK ↓ Rencana Aksi	1 (C)	LKJ/LCK TW III ↓ Kinerjaku	1 (G)		
Rincian Target ↓ Kinerjaku	1 (D)				

Nilai Aspek Kesesuaian = Bobot 30% X Rata-rata Kesesuaian

$$\text{Rata-rata Kesesuaian} = \frac{A+B+C+D+E+F+G+H}{8} \times 100$$

Contoh perhitungan:

Nilai perbandingan (A-H) yang diperoleh mendapat skor 7,8

$$\text{Rata-rata kesesuaian} = (7,8 / 8) \times 100 = 97,5$$

$$\text{Nilai aspek kesesuaian} = 30\% \times 97,5 = 29,25$$

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kesesuaian sebesar 29,25

Aspek Ketercapaian (A-III)

Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2022 pada aplikasi kinerjaku.

Nilai Capaian IKU + IK Tw I	Nilai Capaian IKU + IK Tw II	Nilai Capaian IKU + IK Tw III
99,00 (A)	102,00 (B)	103,00 (C)

Nilai Aspek Ketercapaian = Bobot 40% ($\frac{\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK}}{120} \times 100$)

$$\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK} = \frac{A+B+C}{3} \times 100$$

Contoh perhitungan:

Nilai Capaian IKU + IK yang diperoleh Tw I: 99, Tw II: 102, Tw III: 103

$$\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK} = (99+102+103) / 3 = 101,33$$

$$\text{Nilai aspek ketercapaian} = 40\% \times ((101,33 / 120) \times 100) = 33,78$$

Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek ketercapaian sebesar 33,78

Indikator Sasaran Kegiatan 5

Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Dari pengertian tersebut manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi. Dengan demikian pengetahuan akan bermanfaat ketika dibagikan kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Sejak tahun 2016 penerapan manajemen pengetahuan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh seluruh unit kerja KKP. Tujuannya adalah mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan dan berbagi tukar pengetahuan (knowledge sharing), menutup kesenjangan pengetahuan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya serta meningkatkan kemampuan instansi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan dan pengalaman yang ada. Untuk itu, sebagai bentuk upaya pencapaian target IKU tersebut, KKP menggunakan aplikasi Bitrix24 sebagai sistem manajemen pengetahuan terstandar yang dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja termasuk LRSDKP.

Ruang lingkup manajemen pengetahuan di tahun 2022 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di LRSDKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu: (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) meliputi Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2022, Manual IKU 2022, Rencana Kerja Tahunan 2022, Renaksi Kinerja atas PK Tahunan 2022 dan Laporan Kinerja tahun 2021. (ii) Keikutsertaan Pejabat administratif sampai dengan staf unit kerja (bobot 10%), Pimpinan Unit Eselon I–II, JFT (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator), Staf Pelaksana (minimal 2 orang), Keaktifan Pejabat administratif unit kerja 3 kali dalam 1 triwulan upload berita (bobot 70%), **Pimpinan Unit Eselon II dan JFT yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator**

Capaian IKU Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar pada Tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 11. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 5

Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
100	100	86	100	116,28	-	86	116,28

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2022 mencapai nilai 100% dari target sebesar 86%. Komponen penilaian sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Dokumen 100% (20)

DOKUMEN			
Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2020 - 2024	1	1	100,00
Perjanjian Kinerja (UPT)	1	1	100,00
Manual IKU (UPT)	1	1	100,00
Rencana Kerja Tahunan	1	1	100,00
Rencana Aksi	1	1	100,00
Laporan Kinerja	3	3	100,00
			100,00

2. Nilai Komponen Keikutsertaan 100% (10)

KEIKUTSERTAAN			
LEVEL	Capaian (orang)	Target (orang)	%
Level 3	1	1	100,00
Sub koordinator	3	3	100,00
Pelaksana*	3	3	100,00
			100,00

3. Nilai Komponen Keaktifan 100% (70)

KEAKTIFAN			
LEVEL	Capaian (Aktif)	Target (Aktif)	%
Level 3	12	12	100,00
Sub koordinator	36	36	100,00
			100,00

Capaian triwulan IV merupakan nilai kumulatif dari capaian pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan Triwulan IV, Dengan skor triwulan I sebesar 100%, triwulan II sebesar 100%, triwulan III sebesar 100% dan triwulan IV 100%. Capaian unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2022 mencapai nilai 100% dari target sebesar 86%.

Unit kerja	Capaian MP TW I	Capaian MP TW II	TW II (TW I + TW II)/2	Capaian MP TW III	TW III (TW I + TW II + TW III)/3	Capaian MP TW IV	TW IV (TW I + TW II + TW III + TW IV)/4
LRSDKP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Satker	Nilai Dokumen (%)	Nilai Keikutsertaan (%)	Nilai Keaktifan (%)	Nilai MP Des (%)	Nilai MP Sept (%)	Nilai MP Juni (%)	Nilai MP Maret (%)	Nilai MP Kumulatif Akhir (Rerata Mar+Jun+ Sept+ Des) (%)
1	Pusat Riset Kelautan	20	10	70	100.00	100.00	99.03	100.00	99.76
2	Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	20	10	70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	20	10	70	100.00	98.06	100.00	100.00	99.52

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU 5 pada tahun 2022 ini secara umum adalah:

- 1) Persentase nilai komponen dokumen 20,00% karena dokumen yang ditargetkan sudah diunggah pada sharing dokumen pada aplikasi bitrix24.
- 2) Persentase nilai keikutsertaan sebesar 10,00% karena Pimpinan dan Staff LRSDKP sudah berkontribusi dalam keikutsertaan dari tahun sebelumnya.
- 3) Persentase nilai keaktifan sebesar 70% karena Pimpinan LRSDKP dan 3 koordinator sudah berkontribusi aktif dari tahun sebelumnya dengan upload berita yang mengandung 5W + 1H dalam aplikasi Bitrix24.



Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU seperti kegiatan sosialisasi metode penilaian baru manajemen pengetahuan dan komitmen pimpinan dalam mendukung pencapaian IKU ini yang secara berkala mengingatkan jajarannya untuk aktif dalam manajemen pengetahuan di KKP serta Komunikasi yang rutin dan kontinyu dengan pengelola bitrix dan juga bagian datin pusriskel.

Capaian ini sudah maksimal 100% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media bitrix ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

Indikator Sasaran Kegiatan 6

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)

IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LRSDKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh LRSDKP yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 6

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	100	70	100	142	-	70	142

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%) telah mencapai target yaitu 100% dari target 70%, karena pada tahun 2021 Sampai dengan tahun 2022 ini LRSDKP tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti dan atas anjuran dari sekretariat BRSDM maka realisasi satker yang tidak ada kunjungan dan tidak ada temuan itjen maka nilai realisasinya adalah 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 capaiannya masih sama yakni 100% karena pada tahun 2020 sampai 2021 juga tidak ada temuan itjen yang perlu ditindaklanjuti.

Tercapaiannya IKU ini (tidak ada pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LRSDKP. sering adanya komunikasi tentang realisasi anggaran antara kepala UPT dengan Pusat riset kelautan juga merupakan langkah untuk menghindari adanya pengawasan ITJEN

Indikator Sasaran Kegiatan 7

Nilai IKPA Satker LRSDKP

IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran dan bertujuan untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya, atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sesuai yang ditargetkan.

Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri atas Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri atas Penyerapan Anggaran (20%), Belanja

Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%) dan Dispensasi SPM (5%), dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yaitu Capaian Output (25%). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Capaian Indikator Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 7

Nilai IKPA Satker LRSDKP							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
96,17	91,30	89	97,71	109,79	7,02	89	109,79

Indikator Nilai kinerja pelaksanaan anggaran LRSDKP telah mencapai target yaitu 97,71 atau (109,79%) dari target 89. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 6,41 atau 7,02%.

Pencapaian IKU ini secara umum dipengaruhi oleh adanya pendampingan dan monitoring dari pimpinan dalam mengawal proses UP, TUP revisi, pengadaan barang jasa dll, serta adanya komitmen dari bagian keuangan untuk melakukan penarikan dan juga pertanggungjawaban secara rutin sesuai dengan aturan yang telah dilegalkan dari kementerian keuangan.

Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa indikator seperti Deviasi Halkaman III DIPA yang masih belum maksimal nilainya yakni 8,60% dari 10%. pengelolaan UP dan TUP 9.66% dari 10%, dan Penyerapan anggaran 19,46 dari 20%. Untuk indikator yang lainnya sudah maksimal sesuai dengan batas nilai yang ditetapkan.

Langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan nilai IKPA ke depan antara lain:

- a. Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajua GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang erlambat.
- b. Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN.
- c. Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.
- d. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administrative penyesuaian halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan;
- e. lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
- f. Selektif dalam revisi DIPA kategori pagu tetap, batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan.
- g. Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP dan Teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP).
- h. Disiplin menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan memastikan data LPJ telah di-approve KPPN pada aplikasi SPRINT.
- i. Disiplin dalam penyampaian Renkas (RPD harian) sebelum mengajukan pencairan dana kategori besar.
- j. Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif; Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

Indikator Sasaran Kegiatan 8

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP

Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

Nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada aplikasi online Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART DJA) Kementerian Keuangan (<http://smart.kemenkeu.go.id>). Nilai kinerja tersebut berubah secara real time selaras dengan realisasi keuangan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai output yang diisikan pada aplikasi SMART DJA tersebut.

Capaian atas indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (nilai) adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 8

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
92,83	85,90	81	83,78	103,43	-2,46	81	103,43

Capaian kinerja anggaran (NKA) LRSDKP melalui aplikasi SMART DJA pada tahun 2022 tercapai sebesar 83,78 atau 103,43% dengan capaian Realisasi output sebesar 100,00, penyerapan anggaran sebesar 99,82, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 88,82, efisiensi sebesar 0,18, Nilai Efisiensi sebesar 50,46.

Terjadi Penurunan angka capaian bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,12 atau 2,46% ini dikarenakan terdapat perubahan filosofi penginputan capaian output pada SMART DJA level satuan kerja dari tahun sebelumnya, diantaranya:

- Pada tahun 2016 - 2018 penginputan aplikasi SMART DJA fokus kepada capaian output;

- b. Pada tahun 2019 - 2020 terdapat pengembangan pada aplikasi SMART DJA dimana data capaian output terintegrasi dari aplikasi Sistem Adminitrasi Satker (SAS) sehingga penginputan aplikasi SMART DJA fokus pada koreksi dari capaian output yang diinput melalui aplikasi SAS;
- c. Pada tahun 2021 terdapat pengembangan aplikasi SMART DJA dengan adanya RSPP dan berfokus pada capaian output dari aplikasi SAS yang telah di upload pada aplikasi OMSPAN.
- d. Pada tahun 2022 terdapat pengembangan aplikasi SMART DJA dengan adanya RSPP dan berfokus pada capaian output dari aplikasi SAKTI yang telah di upload pada aplikasi OMSPAN.

Dengan perubahan metode dan pengembangan aplikasi SMART DJA ditahun 2021, maka perlu pemahaman dari pegawai yang menangani aplikasi SAS dalam mengukur capaian output dari RO.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja anggaran (NKA) terdapat beberapa kendala - kendala, antara lain:

- a. Perubahan postur anggaran mengakibatkan adanya perubahan informasi kinerja dan partisipasi Satker dalam penyampaian capaian kinerja pada aplikasi SMART DJA masih rendah;
- b. Capaian output kegiatan sebagaimana terselesaikan pada akhir tahun;

Langkah-langkah perbaikan dan peningkatan capaian nilai kinerja anggaran (NKA) BRSDM kedepan diantaranya:

1. Mempedomani PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran K/L;
2. Pimpinan dimasing-masing Satker harusnya memantau capaian NKA pada aplikasi SMART DJA.

Indikator Sasaran Kegiatan 9

Unit Kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit Kerja)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No. 30/2014).

Capaian atas indikator kinerja unit kerja BRSDM yang menerapkan inovasi pelayanan publik, sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 9

Unit Kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit Kerja)							
Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			% Kenaikan 2021-2022	Renstra LRSDKP 2020-2024	
		Target	Realisasi	% Capaian		Target 2024	% Capaian terhadap Renstra
-	-	1	1	100	-	1	100

Sesuai Surat Sekretaris BRSDM Nomor B.154/BRSDM.1/TU.210/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 perihal Usulan Proposal Inovasi Pelayanan Publik tahun 2022, kemudian dari usulan proposal tersebut dihasilkan 5 (lima) proposal inovasi BRSDM dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Humas sekertariat BRSDM dan diambil tiga terbaik yakni Terbaik 1) Proposal SIMPONY (BPPP Banyuwangi), 2) Proposal Pendaftaran Uji Laboratorium Berbasis Elektronik (BRIH Depok), 3) Proposal Siap Di-Share Mobile (LRSDKP Bungus).

kemudian 3 (tiga) proposal terbaik tersebut kembali dilakukan seleksi oleh Tim Humas BRSDM dan Tim Humas KKP untuk menentukan 1 proposal untuk dikirim ke KKP (Tim Penilaian Inovasi Pelayanan Publik KKP (PIPP KKP), dari seleksi tersebut didapatkan proposal terbaik pertama adalah Proposal SIMPONY (BPPP Banyuwangi), kemudian proposal terbaik kedua Proposal Siap Di-Share Mobile (LRSDKP Bungus) dan ketiga Proposal Pendaftaran Uji Laboratorium Berbasis Elektronik (BRIH Depok). Jadi

yang maju pada penilaian Inovasi Pelayanan Publik KKP (PIPP KKP) adalah proposal SIMPONY (BPPP Banyuwangi).

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain didukung oleh berbagai kegiatan seperti workshop pelayanan publik yang merupakan ajang diskusi dan evaluasi pelayanan publik lingkup BSDM dengan narasumber dari pihak koordinator Pelayanan Publik KKP maupun konsultasi dengan stakeholder KKP. Hal ini mendorong semakin banyaknya proposal inovasi pelayanan publik yang dapat disampaikan oleh LRSDKP dalam lomba inovasi pelayanan publik BRSDM maupun KKP.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2022

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan akhir tahun 2022, Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, adalah sebesar Rp4,799,614,377,- (99,82%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp2.071.588.357,- (99,75%), Belanja Barang sebesar Rp2.728.026.020 (99,85%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 16. Realisasi anggaran LRSDKP tahun 2022

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	2,076,593,000	2,731,896,000	0	6,912,147,000
	Realisasi	2,071,588,357	2,728,026,020	-	4,799,614,377
	%	99,75%	99,85%	-	99, 82%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 31 Desember 2022

Dalam pelaksanaan anggaran, sampai dengan akhir Tahun 2022 masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain:

1. Adanya Perubahan Tusi organisasi dan seringnya pemotongan anggaran (AA) mempengaruhi kinerja dan penyerapan anggaran.

Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan akhir Tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Namun demikian, beberapa rekomendasi demi meningkatkan kinerja dan anggaran antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan juga konsultasi dengan pusat dan sekretariat terkait dengan Tusi dan kelembagaan baru. Memaksimalkan sisa anggaran yang masih terdapat pada DIPA LRSDKP semaksimal mungkin untuk mencapai output yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2022

Indikator Kegiatan		Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%
1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (persen)	Pelayanan Kehumasan Riset Kelautan	6.922.000	6.921.023	99,99
		Pelayanan Kerjasama Riset Kelautan	6.115.000	6.114.244	99,99
		Pelayanan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Riset Kelautan	1.000	0	0
		Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Kelautan	47.217.000	47.038.743	99,62
		Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Kelautan	26.881.000	26.831.673	99,82
		Gaji dan Tunjangan	2.076.593.000	2.071.588.357	99,76
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.537.396.000	2.533.831.188	99,86
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.711.500	8.681.300	99,65
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5.000.000	4.998.900	99,98
2	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan LRSDKP	11.727.500	11.727.295	100
3	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	Perencanaan dan pengembangan SDM LRSDKP	10.000.000	10.000.000	100
4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi (LRSDKP)	14.000.000	13.992.033	9,94

5	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	Layanan Data dan Informasi LRSDKP	5.287.500	5.285.305	9,96
6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah)	26.911.000	26.910.416	100
7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan LRSDKP	11.727.500	11.727.295	100
8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	8.711.500	8.681.300	99,65
9	unit kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit Kerja)	Pelayanan Sistem Informasi Riset Kelautan	5.287.500	5.285.305	99,96
			4,808,489,000	4.799.614.377	99,82

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk

kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor:91/SJ.2/RC.610/I/2023 perihal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan IV Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 18. Perhitungan Efisiensi Anggaran LRSDKP Tahun 2022

Nilai NKA	Penyerapan Anggaran	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Nilai Efisiensi
83,78	9,82	88,82	100	0,18	50,46

Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 5. Nilai Smart LRSDKP Tahun 2022

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,18. Efisiensi Anggaran menunjukkan perlehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai -20, Efisiensi Anggaran 0,18 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 50,46. Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 50,46 dan capaian nilai Smart 83,78 dipengaruhi oleh adanya Realisasi anggaran pada posisi 99,82% dengan tingkat Capaian Realisasi output 100%.

Pencapaian nilai efisiensi sebesar 50,46 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.



BAB IV

PENUTUP

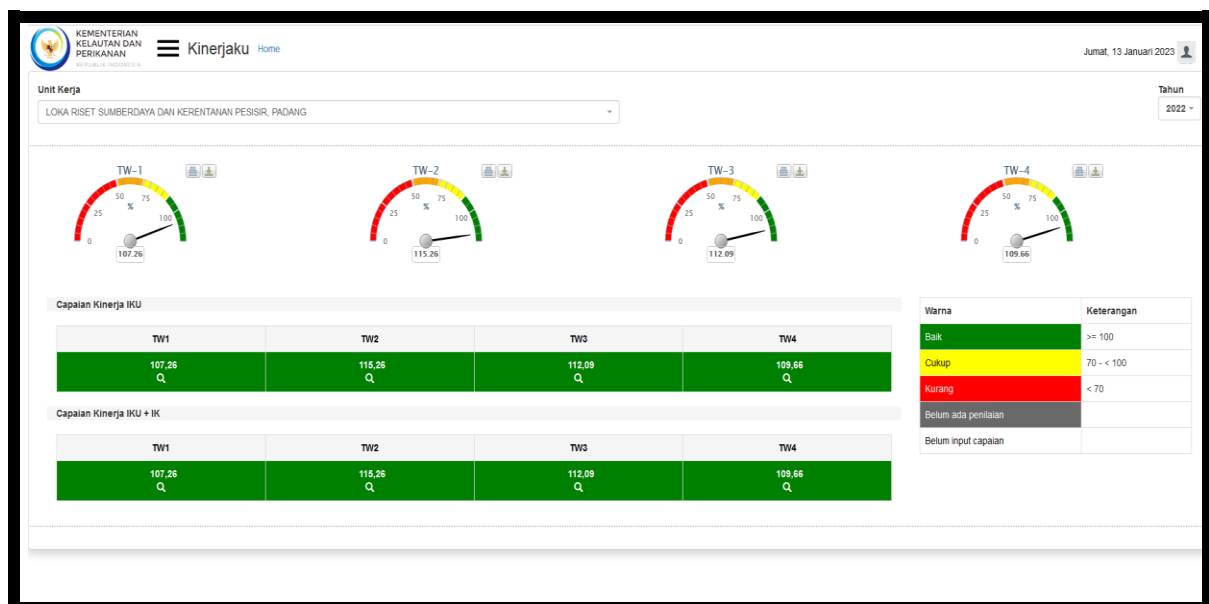
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2022, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama. Selama tahun 2022, dari 9 IKU yang menjadi target LRSDKP, kesemuanya menunjukkan status capaian hijau atau telah mencapai/melampaui dari target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP di tingkat korporat tahun 2022 sebesar 109,66%. sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Rincian Target dan Realisasi dari 9 IKU LRSDKP pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Capaian	%
Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100	100	100
	2	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1	0,01	120
	3	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76	84,5	111,18
	4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92	97,88	106,39
	5	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86	100	116,28
	6	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70	100	120
	7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89	97,71	109,79
	8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81	83,78	103,43
	9	Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1	1	100

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan Target untuk tahun 2023 perlu memperhatikan rencana perubahan organisasi

Pada tahun 2023, terdapat perubahan Organisasi. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap perubahan indikator kinerja utama LRSDKP dan juga atasannya sampai dengan level I bahkan KKP. Target nilai IP ASN misalnya, perlu mendapatkan perhatian karena adanya SDM yang berpindah, mengingat komposisi dan kualifikasi Pendidikan pegawai mempengaruhi terhadap pencapaian IKU IP ASN. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama dan target 2023.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN

PK LRSDKP 2022 AWAL



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711585
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Naelul Hasanah Ridwan
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Radiarta
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir


Nia Naelul Hasanah Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a,b}				
SK.1.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	ISK.1.1.1	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (Unit) ^{a,b}	1
KEGIATAN 2. Riset Kelautan ^c				
SK.2.1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	ISK.2.1.1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) ^c	5
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b				
SK.3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	ISK.3.1.1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100
		ISK.3.1.2	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LRSDKP (Persen)	≤1
		ISK.3.1.3	Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP (Indeks)	76
		ISK.3.1.4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		ISK.3.1.5	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LRSDKP (Persen)	86
		ISK.3.1.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LRSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		ISK.3.1.7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		ISK.3.1.8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a, b}	1.500.000.000
2	Riset Kelautan ^c	1.500.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b	5.412.147.000
TOTAL ANGGARAN		8.412.147.000

^a Output Cadangan

^b Automatic Adjustment

^c Blokir

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

I Nyoman Radjarta



Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PK LRSDKP 2022 REVISI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 3 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711583
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya Dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a,b}				
SK.01	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	IKSK.01.01	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit)	1
KEGIATAN 2. Riset Kelautan ^c				
SK.02.	Tersedianya Data, Informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	IKSK.02.01	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	5
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b				
SK.03	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	IKSK.03.01	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100
		IKSK.03.02	Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1
		IKSK.03.03	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤ 1
		IKSK.03.04	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76
		IKSK.03.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		IKSK.03.06	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86
		IKSK.03.07	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70
		IKSK.03.08	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		IKSK.03.09	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a,b}	1.500.000.000
2	Riset Kelautan ^c	1.500.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b	5.412.147.000
TOTAL ANGGARAN		8.412.147.000

^a Output Cadangan

^b Automatic Adjustment

^c Blokir

Jakarta, Februari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya Dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PK LRSDKP 2022 REVISI 2



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**
Jabatan : Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Mei 2022

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	1 Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) ^a	5
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100
		3 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LRSDKP (Persen)	≤1
		4 Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP (Indeks)	76
		5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LRSDKP (Persen)	86
		7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LRSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		8 Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		9 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81
		10 Unit kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit Kerja)	1

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Riset Kelautan ^a		
1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	1.500.000.000
Dukungan Manajemen ^b		
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	5.412.147.000
TOTAL ANGGARAN		6.912.147.000

Catatan:

^a Blokir

^b Automatic Adjustment

Jakarta, 12 Mei 2022

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PK LRSDKP 2022 REVISI DESEMBER



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

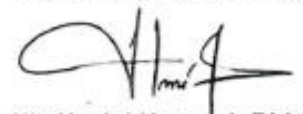
Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan



Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100
		2	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LRSDKP (Persen)	≤1
		3	Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP (Indeks)	76
		4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		5	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LRSDKP (Persen)	86
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LRSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81
		9	Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
	Dukungan Manajemen	4.808.489.000
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	4.808.489.000
TOTAL ANGGARAN		4.808.489.000

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir


Nia Naelul Hasanah Ridwan